



DAFTAR RIWAYAT HIDUP WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	Raden Mas Wijoseno Hario Bimo
Jumeneng Dalem	Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X
Gelar	Kanjeng Bendera Pangeran Haryo Prabu Suryodilogoatau KBPH Prabu Suryodilogo
Jabatan	Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Usia	58 Tahun
Alamat Tempat Tinggal	Harjowinatan PA 2B Purwokinanti Pakualam Yogyakarta
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan*)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	Islam





B. RIWAYAT KEPANGKATAN

Jenjang	Institusi	Tahun
SD	Blok B II Pagi Jakarta	1975
SMP	SMP XI Jakarta	1979
SMA	SMA N 1 Yogyakarta	1982
S-1	UPN Veteran Yogyakarta Jurusan Manajemen	1989

C. RIWAYAT JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun
Kepala Seksi Sarana Buruh dan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja PropinsiDIY	1995
Kepala Seksi Pemberian Kerja	Dinas Tenaga Kerja PropinsiDIY	1999
Kepala Seksi Purna Kerja dan Sektor Informal	Dinas Tenaga Kerja PropinsiDIY	2002
Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Propinsi DIY	2003
Kepala Seksi Pelatihan, Standarisasi dan Sertifikasi	Dinas Tenaga Kerja PropinsiDIY	2003
Pj. Kepala Bidang Pendayagunaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja PropinsiDIY	2006
Kepala Bidang Investasi dan Pemasaran Potensi Wilayah	Badan Perencanaan Daerah Provinsi DIY	2008
Kepala Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY	2009
Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah DIY	2011
Wakil Gubernur	Daerah Istimewa Yogyakarta	2017





D. KETERANGAN KELUARGA

1. Isteri / Suami

No	Nama
1	Atika Purnomowati, SE

2. Anak

No	Nama
1.	Raden Mas Suryo Sri Bimantoro
2.	Raden Mas Bhisno Srenggoro Kuntunugroho





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **K.G.P.A.A. PAKU ALAM X**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **130050**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 818.805.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1090 m²/355 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 818.805.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 503.500.000**

1. MOBIL, UNIVERSAL CJ 7 / JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 1952, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA C 70 / SEPEDA MOTOR Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA NC11C1C A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
6. MOTOR, MAK VIPROS X / RPE125-1/ SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
7. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.5G M/T / MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. MOTOR, HARLEY DAVIDSON XL 53C SPR. CUSTO (883 CC/ SEPEDA MOTOR SOLO) Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. MOTOR, HONDA NF 100 SLD / SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000
10. LAINNYA, JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD AT Tahun 1996,



HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	180.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.555.061.923
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.057.366.923
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.057.366.923

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.